

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini Indonesia tengah melakukan pembangunan di segala bidang untuk membuat negara ini menjadi lebih maju, yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Serta menggunakan berbagai peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang diformalisasikan untuk melindungi seluruh masyarakat sekaligus memberikan kebebasan bagi para investor untuk mengembangkan investasinya. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa:

*“Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam kontrak kerja konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.”*

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa

konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, dimana menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa:

*“Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.”*

Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan juga Penyedia Jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.<sup>1</sup>

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>2</sup> Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur akibat hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan Pengguna Jasa berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Penyedia Jasa.

---

<sup>1</sup> Salim, 2009, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ini, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dalam Kontrak Kerja Konstruksi juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

*“Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”*

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, suatu kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutnya disebut dengan K/L/D/I sebagai Pengguna Jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan pembangunan Kontruksi.

Sebelum pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah selaku Pengguna Jasa dan Badan Usaha atau orang Perseorangan selaku Penyedia Jasa, ada beberapa metode pemilihan Penyedia Jasa yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>3</sup> Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.

Pemerintah untuk menentukan Penyedia Jasa yang akan melakukan pekerjaan Konstruksi di bawah kontrak dengan Pengguna Jasa, yaitu Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Seyembara, Kontes, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.

Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah yang saat ini melakukan pembangunan disegala bidang, dan salah satunya di bidang pendidikan. Keberadaan pembangunan gedung-gedung di bidang pendidikan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Boyolali pada umumnya dan para pelajar pada khususnya, sehingga Boyolali akan menjadi lebih maju dalam segala bidang serta akan terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting, mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan tujuannya tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali melaksanakan Pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

Untuk melaksanakan pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat ingin terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali berjalan dengan lancar dan baik, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi melakukan kontrak kerja pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Tambak.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali adalah salah satu Institusi yang dibentuk Pemerintah untuk memajukan suatu program dari Pemerintah itu sendiri di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sementara CV. Damar Mukti Abadi merupakan salah satu Kontraktor Bangunan yang terletak di Kabupaten Boyolali. Dan pengertian Kontraktor Bangunan sebagai berikut:

*“Kontraktor Bangunan adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di atas adalah pembangunan pergedungan seperti rumah, pabrik, gedung, dsb.; sipil seperti pengairan, jalan, jembatan, dsb.; dan instalasi seperti bangunan, listrik, mesin, air, gas, lift, dsb.”*

Melihat uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji penelitian dan memberikan judul penelitian : “IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.”

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian hukum ini terfokus pada pokok permasalahan serta pembahasan, serta untuk menghindari terjadi penyimpangan masalah, maka penulis menetapkan batas-batas penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam pembangunan gedung Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berdasarkan pandangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **C. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja Konstruksi?
3. Problematika apa yang muncul di dalam pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan skripsi bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi.
2. Untuk Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja Konstruksi.
3. Untuk Mendiskripsikan problematika yang muncul di dalam pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum mengenai perjanjian konstruksi menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan, syarat-syarat dan hubungan hukum antara Pihak Pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa di dalam perjanjian konstruksi menurut pandangan

Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dapat informasi yang jelas kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang bentuk beserta isi-isi perjanjian konstruksi di dalam kerjasama konstruksi antara pengguna barang/jasa dengan penyedia Barang/Jasa menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Doktrinal. Penelitian Doktrinal merupakan penelitian yang memandang konsep hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.



Pendekatan Doktrinal yang digunakan adalah Pendekatan Doktrinal Normatif,<sup>4</sup> yaitu kenyataan yang dapat ditemukan dalam dokumen tertulis yang tertuang di dalam kontrak kerjasama Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.

## **2. Jenis Penelitian**

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan masalah-masalah yang ada, mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti dalam kontrak kerja antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam pembangunan gedung perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi di Boyolali yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data.

## **4. Sumber Data**

Di dalam penelitian ini dibutuhkan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, sebab

---

<sup>4</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 13.

penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data primer dan juga data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di CV. Damar Mukti Abadi.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Tahap awal yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

b. Studi Lapangan (*observasi*)

Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal.

c. Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.<sup>5</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Disdikpora Kabupaten Boyolali serta Pihak CV. Damar Mukti Abadi tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari:

Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi

BAB II LANDASAN TEORI yang terdiri dari:

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian/Kontrak yaitu, Pengertian Perjanjian/Kontrak, Asas-asas Kontrak, Macam-macam Kontrak, Syarat Sahnya Kontrak, Subyek dalam Kontrak, Obyek dalam Kontrak, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa (*Overmacht*) dan Akibat Adanya Suatu Kontrak.

Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu, Pengertian Jasa Konstruksi, Asas dan Tujuan Jasa Konstruksi,

---

<sup>5</sup> S.Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan Jasa Konstruksi, Pengikatan Para Pihak, Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.

Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, Penetapan Harga Sendiri, Jaminan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pemilihan Gagal, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari:

Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi, Pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja Konstruksi dan Problematika yang muncul di dalam pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.

BAB IV PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA